



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 23 November 2020

Halaman: 15

Kurangi 10,63 Hektare Kawasan Kumuh

Penataan di Kota Yogya Sempat Tertunda Pandemi Covid-19

YOGYA, TRIBUN - Program penataan kawasan kumuh kembali disentuh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Di-harapkan, program tersebut bisa dilaksanakan pada tahun depan setelah sebelumnya harus tertunda akibat refo-cising anggaran untuk penan-ganan pandemi Covid-19.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pe-kerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUKPP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, mengata-kan bahwa pihaknya sudah mengusulkan kembali penat-aan ini untuk tahun anggar-an 2021.

"Kami usulkan kembali untuk tahun anggaran 2021. Mudah-mudahan bisa diker-jakan, sehingga luas kawasan kumuh di Kota ini semakin berkurang," katanya, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, beberapa kawasan yang diusulkan un-tuk segera dilakukan penat-aaan tersebut, berlokasi di Ke-lurahan Warungboto, Klitren, serta Gunungketur, yang di-blayai APBD Kota Yogyakarta. Lalu, Kelurahan Gowongan, Wirogunan, serta Terban, de-ngan dana dari APBN.

Sigit pun merinci, anggar-an untuk penataan kawasan kumuh di Warungboto diu-sulkan Rp1,8 miliar, kemu-dian Klitren Rp2 miliar, dan Gunungketur Rp600 juta. Sementara alokasi APBN di Kelurahan Gowongan, Wirogunan dan Terban, cende-rung lebih besar, mencapai Rp18,9 miliar.

KEMBALI MENATA

- Pemkot Yogyakarta kembali menata kawa-san kumuh di wilayah Kota Yogya.
- Anggaran untuk penat-aaan kawasan kumuh di Warungboto diuul-kan Rp1,8 miliar, kemu-dian Klitren Rp2 miliar, dan Gunungketur Rp600 juta.
- Alokasi APBN di Kelurahan Gowongan, Wirogunan dan Terban, cenderung lebih besar, mencapai Rp18,9 miliar.

an itu digulirkan dengan dana dari World Bank. Sehingga, konsep yang diterapkan pun mengacu pada penataan yang dilakukan sebelumnya, dengan sumber pendanaan serupa, yaitu di Bentaran Sungai Gajah Wong, Kelurahan Muja Muju, serta Giwangan.

"Sampai dengan selesainya program penataan di bentaran Sungai Winongo itu, maka total kawasan kumuh di Kota kini tersisa 70,87 hektare," cetusnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, sebelum-nya meminta pembangunan dan aktivitas pengelolaan di kawasan bantaran sungai Gajah Wong dapat dioptimal-kan. Kawasan yang menjadi salah satu area untuk penat-aaan kawasan kumuh ini di-harapkan mampu berbenah dan kian beradaptasi dengan perubahan.

Heroe menyampaikan baha-wa, dirinya berharap banyak bahwa wilayah setempat dap-at mewujudkan area yang bebas kumuh dan melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi. "Karena su-dah banyak yang mengalang bantuan dan dana yang di-salurkan di daerah ini," ucap dia.

Tercatat, biaya pemban-gunan fisik yang sudah terserap untuk penataan kawasan Gajah Wong mulai 2016-2019 bernilai Rp31 miliar lebih. Hal itu terdiri dari APBN senilai Rp15 miliar lebih, APBD Kota Yogya senilai Rp1 miliar lebih dan skala kawa-san NSUP sebesar Rp14 mili-ar lebih. (akajaf)

Tetapi, tambahnya, penata-

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut
Untuk Ditanggapi
Untuk Diketahui
Untuk Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005